

BAB I

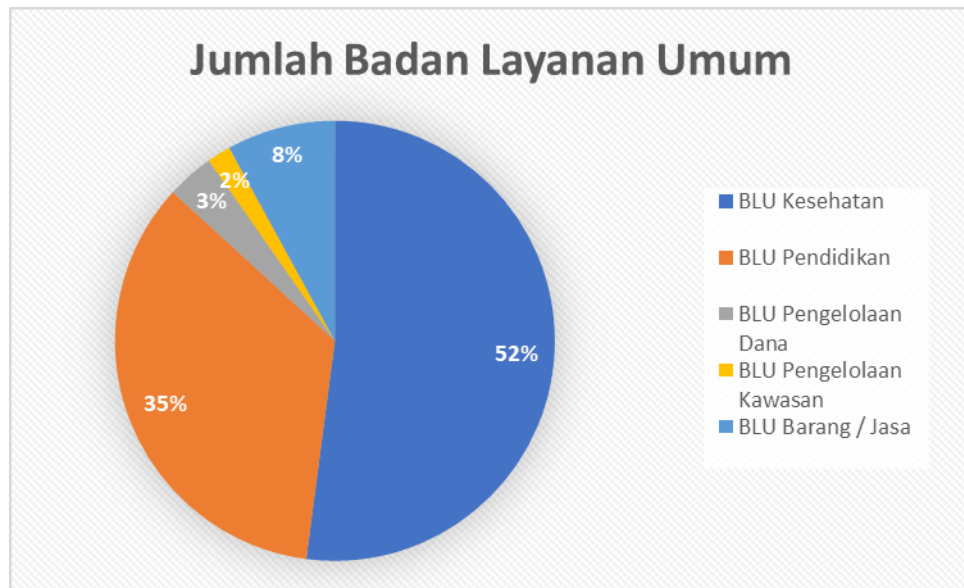
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang terjadi belakangan ini memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap budaya organisasi. Hal ini disebabkan sebuah organisasi dituntut harus mampu beradaptasi dan berubah sesuai dengan perkembangan yang ada disekitar. Suatu era memiliki perubahan yang sangat cepat dan pasar global yang semakin kompetitif. Sehingga masyarakat memiliki kemudahan untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat (David Osborne, and Ted Gaebler :1992).

Sejalan dengan hal tersebut, badan layanan umum (BLU) dibentuk atas dasar teori agensifikasi. Secara umum teori ini adalah adanya pemisahan antara fungsi regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam suatu struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama sebagai regulator dilaksanakan oleh kantor pusat, sedangkan fungsi kedua dijalankan oleh kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Badan Layanan Umum (BLU) didirikan atas dasar memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukannya didasarkan atas produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah merupakan bentuk pelaksanaan amanat dalam pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Produk hukum ini semata-mata bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada publik oleh Pemerintah dimana bentuk Badan Layanan Umum di antaranya adalah rumah sakit baik rumah sakit pemerintah pusat maupun rumah sakit pemerintah daerah. Perkembangan satker BLU terus bertambah sejak awal pembentukannya pada tahun 2005, hingga triwulan 1 tahun 2020, Dapat dilihat dari grafik berikut :



Grafik 1

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah satuan kerja BLU mencapai 243 yang terdiri atas 105 BLU rumpun kesehatan, 100 BLU rumpun pendidikan, 10 BLU rumpun pengelola dana, 5 BLU pengelola kawasan, dan 23 BLU barang/jasa lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Adapun pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 yang mengandung tiga kaidah manajemen

keuangan negara, yaitu orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas pemborosan.

Menurut Mediya Lukman, institusi penyelenggara layanan publik dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) bentuk yakni institusi birokrasi biasa dengan derajat otonomi dan kemandirian yang terbatas atau tidak ada sama sekali, BLU/D sebagai institusi yang semi otonom, dan BUMN/D sebagai institusi publik/negara yang benar-benar otonom dalam mengelola setiap sumber daya dan pembuatan keputusan. Dalam perkembangan selanjutnya setelah keluarnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maka ditambahkan 1 (satu) bentuk lagi institusi penyelenggara layanan publik yang memiliki otonomi dan diskresi jauh lebih besar daripada institusi/organisasi publik yang berbentuk BLU yaitu BPJS dan PTN badan hukum(Lukman: 2013).

Untuk mewujudkan tujuan nasional maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrasi. Berdasarkan Peraturan tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang sudah aktif beroperasi selama beberapa tahun terakhir. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan BLU tersebut perlu dikaji untuk

menemukan perbaikan-perbaikan yang dapat diterapkan pada periode selanjutnya. UIN-SU seperti yang diketahui sudah memiliki jumlah mahasiswa yang cukup besar. Sehingga anggaran yang dikelola juga cukup besar baik dari pembayaran SPP maupun jasa layanan non pendidikan seperti sewa gedung dan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti diperoleh bahwa pendapatan yang diperoleh UIN-SU dari pengelolaan penyewaan aset memiliki fluktuasi yang cukup tinggi. Pendapatan paling rendah diperoleh pada periode Oktober 2019 sebesar Rp. 19.600.000,00,- sedangkan pendapatan paling tinggi diketahui pada bulan Juli 2019 sebesar Rp. 100.800.000,00,-. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pedagang di lingkungan kampus, diketahui bahwa penetapan nilai sewa yang ditetapkan oleh pihak kampus masih cenderung kurang transparan. Adanya fluktuasi yang tinggi tersebut mengharuskan adanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabilitas. Sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan pengkajian terhadap pengelolaan sektor bisnis dalam meningkatkan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) di UIN-SU.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul: “**Analisis Pengelolaan Sektor Bisnis Untuk Meningkatkan Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) di UIN-SU**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sektor bisnis Badan Layanan Umum (BLU) di UIN-SU?
2. Bagaimana penerimaan/kinerja Badan Layanan Umum (BLU) UIN-SU jika ditinjau berdasarkan aspek akademik maupun non akademik?
3. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) UIN-SU?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sektor bisnis Badan Layanan Umum (BLU) di UIN-SU.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan/kinerja Badan Layanan Umum (BLU) UIN-SU ditinjau berdasarkan aspek akademik maupun non akademik.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemukan dalam meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) UIN-SU.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan diimplementasikan terhadap permasalahan penelitian.
2. Bagi BLU UIN-SU, sebagai bahan masukan dalam menentukan perbaikan terhadap peningkatan kinerja BLU untuk periode ke depannya.
3. Bagi akademisi, sebagai bahan masukan, dapat di jadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dan informasi bagi pihak lain yang berguna serta dapat memberikan gambaran bagi selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

E. Batasan Masalah

Merujuk pada identifikasi masalah yang ada, penelitian ini lebih difokuskan pada Analisis Pengelolaan Sektor Bisnis Untuk Meningkatkan Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Di UIN-SU